

DAFTAR PUSTAKA

- A., Denny J. *Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Altay, Asuman. "The Efficiency of Bureaucracy on the Public Sector." *Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Science Journal* 14, no. 2 (1999): 35–51.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/deuibfd/issue/22772/243068>.
- Ambarwati, Wiwid, Gustiana Anwar Kambo, and Muhammad. "The Violation of Bureaucracy at Local Election in Gowa South Sulawesi: Based on Weberian and Marxism Concept." *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08, no. 2 (2020): 297–311.
- Arifin, Indar. "Birokrasi Pemerintahan Dan Perubahan Sosial Politik Di Kabupaten Wajo." Universitas Hasanuddin, 2007.
- B. Herry Priyono. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- CNN Indonesia. "KASN Mulai Periksa 15 Camat Ikut Kampanye Jokowi Di Makassar," 2019.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190327161302-32-381184/kasn-mulai-periksa-15-camat-ikut-kampanye-jokowi-di-makassar>.
- Deni, Saiful, and Aji Deni. *Dikotomi Politik Dan Administrasi*. Yogyakarta: Gramasurya, 2022.
- Djumadin, Zainul. *Birokrasi Dan Politik Pada Era Pemerintahan Orde Baru Di Indonesia*. Jakarta: LPU-UNAS, 2018.
- Dwiyanto, Agus, Partini, Ratmino, Bambang Wicaksono, Wini Tamtiari, Bevaola Kusumasari, and Mohammad Nuh. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Firman. "Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung." *IJPA-The International Journal of Public Administration* 3, no. 2 (2017): 1–18.
- George Ritzer, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Edited

- by Tri Wibowo Budi Santoso. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hidayat, Fauzan. "Politisasi Birokrasi: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 14, no. 2 (2021): 11–21.
- Irham, Muhammad Aqil. *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Jayanti, Nur Putri. "Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum (Neutrality of The Role of State Civil Apparatus in Publik Policies and General Election)." *Jurnal Analisis Kebijakan* 3, no. 1 (2019).
- Jones, Pip, Liz Bradbury, and Sahun Le Boutillier. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Edited by Achmad Fedyani Saifuddin. Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- KASN, NKKNET/Humas. "Hasil Survei KASN: Politisasi Birokrasi Terus Mengancam, Sebagian ASN Minta Hak Politik Dicabut." Jakarta, 2021. <https://kasn.go.id/id/publikasi/hasil-survei-kasn-politisasi-birokrasi-terus-mengancam-sebagian-asn-minta-hak-politik-dicabut>.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Perkembangan Demokrasi Dan Pengaruh Terhadap Birokrasi Publik (Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parlementer)*. Yogyakarta: Gava Media, 2005.
- Mahmud, Amran. *Birokrasi Dan Tata Pemerintahan Bersih: Aktualisasi Nilai Budaya Islam Lokal*. Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2017.
- Mahmud, Ramli, Sofyan Alhadar, and Asmun Wantu. "Perspektif Perilaku Sosiologi Birokrasi Dalam Pemilu (Studi Perilaku Politik ASN Dalam

- Pemilu 2019 Di Kabupaten Boalemo).” *Jurnal POLITICO FISIP UNSRAT* 10, no. 4 (2019): 85–97.
- MENPANRB, Humas. “Pelanggaran Netralitas ASN Banyak Terjadi Di Sulsel Dan Sultra.” [menpan.go.id](https://www.menpan.go.id), 2018. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pelanggaran-netralitas-asn-banyak-terjadi-di-sulsel-dan-sultra>.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Municipality, BPS-Statistics of Makassar. *Kota Makassar Dalam Angka 2022*. Makassar: BPS Kota Makassar, 2022.
- Munsir, Ibnu. “Bawaslu Makassar Kembali Temukan 10 ASN Tak Netral.” news.detik.com, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5179876/bawaslu-makassar-kembali-temukan-10-asn-tak-netral>.
- Pranata, Aan. “40 SK Danny Pomanto Dianulir, Mutasi 1.228 Pejabat Makassar Batal Berdasarkan Rekomendasi Kemendagri Dan KASN,” 2019. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/40-sk-danny-pomanto-dianulir-mutasi-1228-pejabat-makassar-batal?page=all>.
- Sadikin, Hanifah, Subhilnar, and Hari Kusmanto. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020.” *PERSPEKTIF* 11, no. 1 (2022): 355–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5639>.
- Said, M. Mas’ud. *Birokrasi Di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, 2007. “Sejarah Kota Makassar,” 2022. <https://makassarkota.go.id/>.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2013.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Pertama. Jakarta: Kencana

- Prenada Media Group, 2008.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Wahyudi, Heru, and Zakaria Habib Al-Ra'zie. "Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Petahana; Kasus Pilkada Di Lebong Dan Banten." *Jurnal Adhikari 2*, no. 1 (2022): 292–301.
- Wekke Suardi, Ismail dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Yudiatmaja, Wayu Eko. "Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik Dan Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 3, no. 1 (2018): 10–28. <https://doi.org/10.31629/juan.v3i1.662>.

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11, Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/467/SKP/DPMPTSP/V/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17339/S.01/PTSP/2023 Tanggal 23 Mei 2023;
 5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/476-II/BKBP/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : **OLAN NUR RAKHMAT JOHANSYAH**
NIM / Jurusan : E052211007 / Ilmu Politik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar
Lokasi Penelitian : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar**
Waktu Penelitian : 26 Mei 2023 s/d 20 Juli 2023
Tujuan : Tesis
Judul Penelitian : **"RELASI POLITIK BIROKRASI PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR"**

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpoldmks@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 30 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

